



**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN  
PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL MELALUI SEKTOR  
PERIKANAN TANGKAP**

(Studi Pada Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan)

**SKRIPSI**

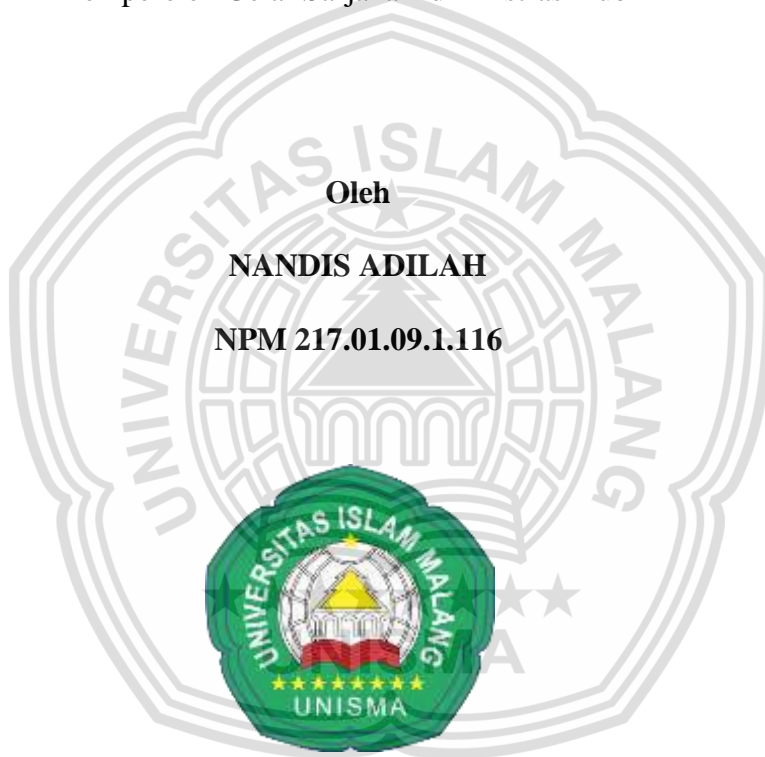
Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik

Oleh

**NANDIS ADILAH**

**NPM 217.01.09.1.116**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**MALANG**

**2022**

## RINGKASAN

Nandis Adilah, 2021, NPM 21701091116, Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Perikanan Tangkap (Studi Pada Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan) Prof. Dr. Yaqub Cikusin, M.Si Dosen Pembimbing I, Dr. Hayat, S.AP., M.Si Dosen Pembimbing II.

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Sektor Perikanan Tangkap, Faktor Pendukung dan Penghambat dan untuk mengetahui Dampak dari Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Perikanan Tangkap di Kabupaten Lamongan. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan dengan menggunakan metode jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan adalah peran, peran pemerintah daerah, pengembangan ekonomi lokal, dan sektor perikanan tangkap, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan kepercayaan untuk mengecek keabsahan data, Analisis data pada penelitian ini menggunakan tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam meningkatkan pengembangan ekonomi lokal melalui sektor perikanan tangkap yaitu sebagai entrepreneur yaitu sebagai pengembangan sumberdaya manusia melalui pelatihan dan sosialisasi, sebagai koordinator yaitu mengkoordinir semua lembaga termasuk stakeholders, sebagai fasilitator yaitu memberi bantuan seperti alat tangkap dan alat pengolah pengusaha perikanan, sebagai stimulator yaitu dalam mempercepat pengembangan ekonomi melalui pameran pengolah hasil perikanan. Faktor pendukung tersedianya sumberdaya perikanan tangkap, peran dalam kub perikanan tangkap, adanya peran stakeholders, faktor penghambat yaitu kualitas sumberdaya masyarakat yang masih rendah, keterbatasan jumlah aparatur pemerintah dan keterbatasan anggaran. Memberikan dampak yang baik bagi nelayan dan pelaku industri pengolah hasil perikanan, dan meningkatnya hubungan jaringan kemitraan. Maka kesimpulan dari penelitian ini adalah Kab. Lamongan memiliki produksi perikanan tangkap terbesar namun masih rendah kualitas sumberdaya manusia seperti menangkap ikan masih seenaknya, kurangnya informasi, kurangnya pemasaran yang tepat serta keterbatasan aparatur yaitu kurangnya penyuluh perikanan. Solusi dari Dinas perikanan yaitu melalui kegiatan pelatihan dan sosialisasi kepada nelayan. Saran semoga dari pihak Dinas Perikanan Kab. Lamongan menambahkan tim petugas pelatihan dilapangan. Saran dari penulis kedepannya kepada masyarakat pesisir supaya bisa memanfaatkan semua fasilitas yang sudah diberikannya oleh Dinas Perikanan.

**Kata kunci: Peran Pemerintah Daerah, Pengembangan Ekonomi Lokal, Sektor Perikanan Tangkap**

## SUMMARY

*Nandis Adilah, 2021, NPM 21701091116, Public Administration Major Faculty of Administrative Science University of Islam Malang, The Role of Local Governments in Increasing Local Economic Development Through Capture Fisheries (Study at the Lamongan District Fisheries Service) Prof. Dr. Yaqub Cikusin, M.Si First Advisor, Dr. Hayat, S.AP., M.Si Supervisor II.*

---

*This study aims to determine the role of local governments in improving local economic development through the capture fisheries sector, supporting and inhibiting factors and to determine the impact of local economic development through capture fisheries in Lamongan Regency. This research was conducted at the Fisheries Service of Lamongan Regency using a descriptive research type method with a qualitative approach. The theory used is the role, the role of local government, local economic development, and the capture fisheries sector. Data collection techniques are carried out by interview, observation, and documentation techniques. Researchers use trust to check the validity of the data. Data analysis in this study uses three components, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions.*

*The results of the study indicate that the role of local governments in improving local economic development through the capture fisheries sector is as an entrepreneur, namely as human resource development through training and socialization, as a coordinator, namely coordinating all institutions including stakeholders, as a facilitator, namely providing assistance such as fishing gear and processing equipment. fishery entrepreneurs, as a stimulator, namely in accelerating economic development through exhibitions for processing fishery products. The supporting factors are the availability of capture fisheries resources, the role in the capture fisheries community, the role of stakeholders, the inhibiting factors, namely the low quality of community resources, the limited number of government officials and budget constraints. Provide a good impact for fishermen and fishery product processing industry players, and increase partnership network relationships. So the conclusion of this research is District Lamongan has the largest capture fishery production but the quality of human resources is still low, such as catching fish arbitrarily, lack of information, lack of proper marketing and limited apparatus, namely the lack of fishery instructors. The solution from the Department of Fisheries is through training and outreach activities to fishermen. Suggestions hopefully from the District Fisheries Office. Lamongan added a team of field training officers. Suggestions from the author in the future to coastal communities so that they can take advantage of all the facilities that have been provided by the Fisheries Service.*

**Keywords:** *Role of Local Government, Local Economic Development, Capture Fisheries Sector*

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan hal yang sangat penting di suatu negara berkembang termasuk di negara Indonesia ini, karena dalam negara yang berkembang pembangunan sangat diperlukan untuk mensejahterakan masyarakat. Pembangunan mempunyai beberapa paradigma yang salah satunya yaitu paradigma pembangunan berkelanjutan, dalam proses pembangunan ini dilakukan melalui aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Warga negara sebagai bagian dari suatu negara menaruh banyak harapan kepada negara, karena dengan hal ininegara diharapkan akan memberikan pelayanan terhadap apa yang menjadi kepentingan warga negaranya karena kepentingan tersebut sangat beragam dan mengalami dinamika. Hayat (2018:22-23) mengatakan maka dari itu negara harus tahu apa yang menjadi masalah dimasyarakat dan menetapkan solusi. Di negara berkembang aspek ekonomi lebih diperhatikan karena dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga kehidupanya menjadi lebih baik (Yenny, 2020:7).

Di era sekarang ini, pemerintah daerah seharusnya berperan aktif dalam program pembangunan daerah, salah satunya strategi pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi lokal yaitu dengan menggunakan pendekatan pembangunan ekonomi lokal. Pembangunan ekonomi lokal merupakan cara untuk mensejahterakan masyarakat karena dengan pengembaganan ekonomi lokal

semua sektor terutama pada pemerintah daerah dan masyarakat bekerjasama untuk mengelola potensi daerah supaya bisa bermanfaat. pembangunan ekonomi lokal adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi yang baru, pembentukan industri alternatif, perbaikan kapasitas untuk menghasilkan produk dan jasa supaya lebih baik, indentifikasi pasar, ahli ilmu pengetahuan serta peningkatan perusahaan yang baru dengan bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan peluang kerja bagi masyarakat daerah (Alisjahbana, 2012:13).

Langkah pemerintah untuk meningkatkan perekonomian Indonesia terutama di daerah yaitu dengan membelakukan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang dalam menjalankan kegiatan pembangunan, melalui Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang no 23 Tahun 2014, daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengatur daerahnya sendiri dengan sedikit campur tangan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah memiliki hak dan wewenang untuk menggunakan sumber keuangan yang dimiliki sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Perencanaan yang dibuat oleh pemerintah, terdapat tahapan perencanaan pembangunan daerah, hal tersebut dilakukan karena pemerintah pusat mempunyai keterbatasan dalam sumberdaya, sehingga pemerintah pusat sangat membutuhkan peran pemerintah daerah untuk menjalankan pembangunan daerah. Menurut Hayat (2014: 226) kualitas sumberdaya aparatur berpengaruh terhadap kinerja pelayanan dengan kemampundan kualitas yang dimiliki berdampak pada kinerja yang dilakukan. begitu juga dengan kemampuan dan tanggung jawab harus sesuai dengan kompetensi yang

dimiliki oleh aparatur pelayanan. Sehingga kebijakan akan berdampak positif terhadap pelayanan yang diberikan. Menurut Arsyad (1999:120) terdapat empat peran pemerintah daerah dalam meningkatkan pengembangan potensi sumberdaya daerahnya antara lain 1) *Entrepreneur*, yaitu pengelolaan sumberdaya daerah, 2) Koordinator yaitu pembuat kebijakan, 3) Fasilitator yaitu sebagai peningkatan potensi sumberdaya, 4) Stimulator yaitu percepatan pembangunan.

Indonesia sebagai negara maritim dan juga mempunyai kekayaan akan hasil lautnya, melihat potensi sumberdaya alam yang ada di Indonesia yang sangat melimpah, negara ini merupakan kepulauan terbesar yang dibagi menjadi beberapa pulau, antar pulau dipisahkan oleh perairan dan daratan, yang mencakup pulau besar dan kecil yang merupakan kesatuan wilayah, politik, sosial budaya dan ekonomi, mempunyai potensi kelautan dan perikanan yang begitu besar. Masyarakat yang hidup di daerah laut disebut sebagai masyarakat pesisir dan sebagian besar masyarakat pesisir bermata pencaharian sebagai nelayan. Menurut (United national environment Program dalam Kementrian Pekerjaan Umum 2012) menyatakan bahwa wilayah Indonesia dan samudra pasifik mempunyai luas seluruhnya sebesar 7,9 juta km, luas daratan 1,8 juta km atau 20%, luas perairan mencapai 6,1 juta km atau sekitar 77%. Luas perairan tersebut terbagi dari laut territorial seluas 3,2 juta km dan mempunyai zona ekonomi eksklusif sebesar 2,7 juta km. dengan melihat kondisi geografis tersebut Indonesia mempunyai potensi ekonomi perikanan dan kelautan yang besar.

Sementara itu Food and Agriculture Organization dalam (Kementrian Pekerjaan Umum 2012) menyebutkan bahwa Indonesia sebagai produsen ikan terbesar didunia, hal ini berdasarkan data dari tahun 2006 yang menunjukkan bobot produksi ikan Indonesia mencapai 87,1 juta ton. Hasil tangkapan laut Indonesia mencapai 25 persen dari hasil keseluruhan tangkapan laut didunia. Selain potensi kekayaan laut perairan Indonesia juga mempunyai andil besar dalam perdagangan dunia lebih dari 80 persen perdagangan dunia dengan nilai lebih dari 500 dolar AS pada tahun 2006 berlangsung melalui laut.

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu kabupaten yang terletak di pantai utara Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lamongan memiliki potensi sumber daya perikanan terbesar. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan (2018) berdasarkan sub sektor perikanan produksi sumberdaya perikanan antara lain yaitu perikanan tangkap sebesar 76.338,90 ton, perairan umum sebesar 2.976,2 ton, tambak sebesar 4.259,55 ton, sawah tambak sebesar 50.301,54 ton, kolam sebesar 2.315,20 ton, dan yang terakhir keramba sebesar 14,26 ton. Dari berbagai sektor tersebut produksi perikanan di Kabupaten Lamongan pada tahun 2018 sebesar 136.225,56 ton.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan tahun 2018 diatas, Kabupaten Lamongan mempunyai potensi terbesar pada sektor perikanan. Sektor perikanan sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lamongan sehingga upaya pemerintah Lamongan untuk meningkatkan percepatan pada pertumbuhan ekonomi daerah yaitu dengan mengembangkan pada sektor

perikanan tangkap yang didukung, bahwa kabupaten lamongan mempunyai kekayaan alam yang berupa laut dan panjang pantai mencapai 47 km. kabupaten Lamongan merupakan salah satu kabupaten yang berkontribusi hampir 18,6 persen hasil produksi perikanan tangkap ke provinsi jawa timur.

**Tabel 1**  
**Produksi dan nilai produksi Perikanan Tangkap di Provinsi Jawa Timur**

Kabupaten/Kota	Sektor Perikanan Tangkap			
	Tahun 2018		Tahun 2019	
	Produksi (dalam ton)	Produksi (dalam ribu) Rp	Produksi (dalam ton)	Produksi (dalam ribu) Rp
Kabupaten Pacitan	11.127	364.141.235	13.179	173.036.906
Kabupaten Trenggalek	28.690	243.702.231	29.266	203.735.773
Kabupaten Tulungagung	3.337	70.890.197	4.243	45.926.407
Kabupaten Blitar	3.248	91.306.009	5.872	87.599.636
Kabupaten Malang	16.871	649.014.997	19.768	287.024.569
Kabupaten Lumajang	5.018	91.098.653	5.178	64.362.753
Kabupaten Jember	9.723	259.743.974	13.433	183.883.196
Kabupaten Banyuwangi	74.668	2.369.646.380	104.305	1.514.167.364
Kabupaten Situbondo	15.122	284.331.227	14.753	289.596.333
Kabupaten Probolinggo	23.944	457.274.987	26.248	340.682.889
Kabupaten Pasuruan	21.391	902.309.019	23.448	320.008.123
Kabupaten Sidoarjo	15.220	260.121.394	15.416	137.952.460
Kabupaten Tuban	13.355	238.175.728	5.890	65.524.307
Kabupaten Lamongan	73.847	1.410.740.277	53.038	895.598.202
Kabupaten Gresik	21.542	678.303.191	3.181	43.789.710
Kabupaten Bangkalan	25.963	873.927.763	42.752	1.929.557.800
Kabupaten Pamekasan	19.554	356.579.139	21.886	375.167.622
Kabupaten Sampang	9.395	242.788.717	14.494	333.785.769
Kabupaten Sumenep	44.346	1.262.675.098	51.362	1.342.574.097
<b>Jumlah</b>	436.361	9.844.095.118	467.712	8.630.973.915

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, 2020

Berdasarkan tabel 1 diatas menggambarkan bahwa produksi perikanan tangkap diberbagai kabupaten di Jawa timur rata-rata pada setiap tahunnya



mengalami peningkatan produksi. Pada tahun 2020 saja produksi perikanan di Kabupaten Lamongan mengalami kenaikan sebesar 139.547,48 ton yang sebagian besar 85 persen dijual dalam bentuk segar sehingga harga persatuannya rendah. Hal ini memunculkan upaya agar produk perikanan yang berlimpah tersebut bisa diolah menjadi produk olahan ikan. Meskipun Lamongan sebagai penghasil ikan terbesar di Jawa Timur namun masih belum mempunyai produk unggulan daerah berbasis ikan yang diunggulkan, sehingga diperlukan upaya untuk memunculkan unggulan tersebut. Dengan tujuan untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat lokal.

Pemerintah Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan memiliki wewenang dalam mengembangkan ekonomi lokal melalui perikanan tangkap yang telah melakukan beberapa kegiatan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, pengembangan sumberdaya manusia, pengembangan kemitraan dan lainnya. Seperti sosialisasi cara penangkapan ikan tanpa menggunakan pukat harimau, menjalankan program kawasan minapolitan dan juga pembentukan kelompok nelayan serta pendampingan dan bimbingan terhadap pelaku usaha. Sehingga dengan beberapa jenis kegiatan yang diberi sangat membantu para nelayan perikanan tangkap dalam melakukan aktivitas.

Sektor perikanan merupakan sektor yang menjadi perhatian utama bagi pemerintah kabupaten lamongan, hal ini dikarenakan pada sektor inilah yang memberikan kontribusi terbesar dalam perolehan pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten lamongan. Sektor perikanan terutama pada sektor perikanan tangkap

ini bisa dikatakan sebagai sektor yang paling diunggulkan oleh pemerintah kabupaten lamongan. Maka dari itu didalam Undang-Undang tersebut telah diatur tentang beberapa wewenang dalam mengelola perikanan tangkap, yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Pasal 18 yang berbunyi: Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumberdaya di wilayah laut. Kewenangan tersebut yaitu: a). Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut, b). Pengaturan administratif, c). Pengaturan tata ruang, d). Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah, e). Ikut serta dalam pemeliharaan keamanan, f). Ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.

**Tabel 2**

**Jumlah Nelayan di Wilayah Pesisir Kabupaten Lamongan 2019-2020**

No	Desa	Jumlah Nelayan	
		2019	2020
1.	Paloh	873	878
2.	Wrulor	184	189
3.	Sidokumpul	618	623
4.	Weru	1.056	1.261
5.	Sidokelar	112	117
6.	Kemantren	477	577
7.	Banjarwati	812	912
8.	Kranji	1.161	1.261
9.	Paciran	1.263	1.563
10.	Tunggul	144	244
11.	Kandangsmangkon	3.172	3.272
12.	Blimbing	5.634	5.734
13.	Brondong	2.063	2.363
14.	Sedayulawas	567	667
15.	Labuhan	1.416	1.516
16.	Brengkok	111	311
17.	Lohgung	1.312	1.512
<b>Total jumlah</b>		<b>20.975</b>	<b>23.000</b>

Sumber: Dokumen Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan

Dari tabel berikut menunjukan bahwa Kabupaten Lamongan memiliki 2 Kecamatan yang terbagi 17 Desa di Pesisir Kabupaten Lamongan dengan mayoritas masyarakat pesisir mempunyai kegiatan ekonomi di perikanan dan kelautan, diantaranya sebagai nelayan, buruh nelayan, Juragan, pengelola hasil perikanan dan lainnya. Jumlah nelayan di setiap tahunnya mengalami peningkatan, selain jumlah nelayan Kabupaten Lamongan memiliki produksi ikan laut yang berasal dari 5 pangkalan pendaratan ikan (PPI) dan juga tempat pelelangan ikan (TPI).

Berdasarkan surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 35/KEPMEN-KP/2013, tentang penetapan kawasan minapolitan yang menyatakan bahwa Kabupaten Lamongan menjadi salah satu dari 12 Kabupaten di Jawa Timur yang ditetapkan sebagai kawasan minapolitan. Kabupaten Lamongan sebagai sentra kawasan minapolitan dengan pusat pengelolaan minapolitan (PPM) di PPN Brondong serta memiliki 5 pelabuhan perikanan diantaranya yaitu Lohgung, Labuhan, brondong, Kranji dan Weru. Sehingga dikatakan sebagai kawasan permukiman perkotaan dengan kegiatan perikanan sebagai aktifitas dominan bagi daerah yang terletak disepanjang pantura (Pemukiman Nelayan). Sebab dilihat dari kondisi geografis yang terletak diantara pesisir laut dan juga dengan didukungnya produktifitas perikanan tangkap di Kabupaten Lamongan pada tahun 2020 sebesar 76.692,96 ribu ton dengan total nilai produksi sebesar Rp. 1.188.671.626.220 menurut laporan Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan ada kenaikan 3,7 persen dibanding tahun 2019 dan memberikan sumbangan hampir 40 persen produksi perikanan tangkap untuk Kabupaten Lamongan. (Badan Pusat Statistik Lamongan, 2020).

Potensi sumberdaya perikanan tangkap di Kabupaten Lamongan memanglah besar dari tahun ke tahunnya, dengan adanya potensi ini sehingga mampu meningkatkan ekonomi lokal sektor perikanan tangkap. Nelayan merupakan salah satu pelaku utama penting dalam pembangunan perikanan nasional, pada saat ini kondisi nelayan tidak hanya dihadapkan pada masalah kemiskinan namun juga termasuk rendahnya tingkat pendidikan yang berdampak pada hal-hal lainnya.

Menurut data Badan Pusat Statistik Lamongan (2020) diatas Kabupaten Lamongan merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki produksi perikanan tangkap terbesar di Jawa Timur, namun masih rendahnya kualitas sumberdaya masyarakat seperti pertama, menangkap ikan masih menggunakan dengan cara tradisional secara turun temurun dari nenek moyang yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, penguasaan teknologi yang masih rendah, kedua, kurangnya informasi tentang penggunaan alat tangkap yang diperbolehkan atau dilarang oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan bahwa alat tangkap yang dilarang itu bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan dan mengurangi populasi ikan yang ada dilaut, dan ketiga, juga kurangnya pemasaran yang tepat bagipengusaha pengolah ikan yaitu belum terkenal produk olahan ikan yang ada di kawasan pesisir perikanan tangkap Kabupaten Lamongan tentu saja hal seperti ini memerlukan perhatian oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dari itu peran pemerintah daerah yaitu Dinas Perikanan sangatlah penting dalam mengatasi permasalahan yang ada, karena pemerintah daerah merupakan aktor utama yang sentral dalam pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Lamongan. Maka dari itu penulis tertarik meneliti

tentang pengembangan ekonomi lokal di sektor perikanan tangkap dari sisi pemerintah daerah, maka peneliti mengambil judul **“PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL MELALUI SEKTOR PERIKANAN TANGKAP (STUDI PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN LAMONGAN)”**

### **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang masalah diatas, untuk itu penulis merumuskan permasalahan yang menjadi fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam meningkatkan pengembangan ekonomi lokal melalui sektor perikanan tangkap di Kabupaten Lamongan?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pemerintah daerah dalam meningkatkan pengembangan ekonomi lokal melalui sektor perikanan tangkap di Kabupaten Lamongan?
3. Bagaimana dampak dari pengembangan ekonomi lokal melalui sektor perikanan tangkap di Kabupaten Lamongan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah pada pembahasan pendahuluan yang dijelaskan diatas, maka untuk itu dapat menentukan tujuan dari penelitian diantaranya sebagai berikut:

4. Untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam meningkatkan pengembangan ekonomi lokal melalui sektor perikanan tangkap.

5. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pemerintah daerah dalam meningkatkan pengembangan ekonomi lokal melalui sektor perikanan tangkap.
6. Untuk mengetahui dampak dari pengembangan ekonomi lokal melalui perikanan tangkap di kabupaten lamongan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

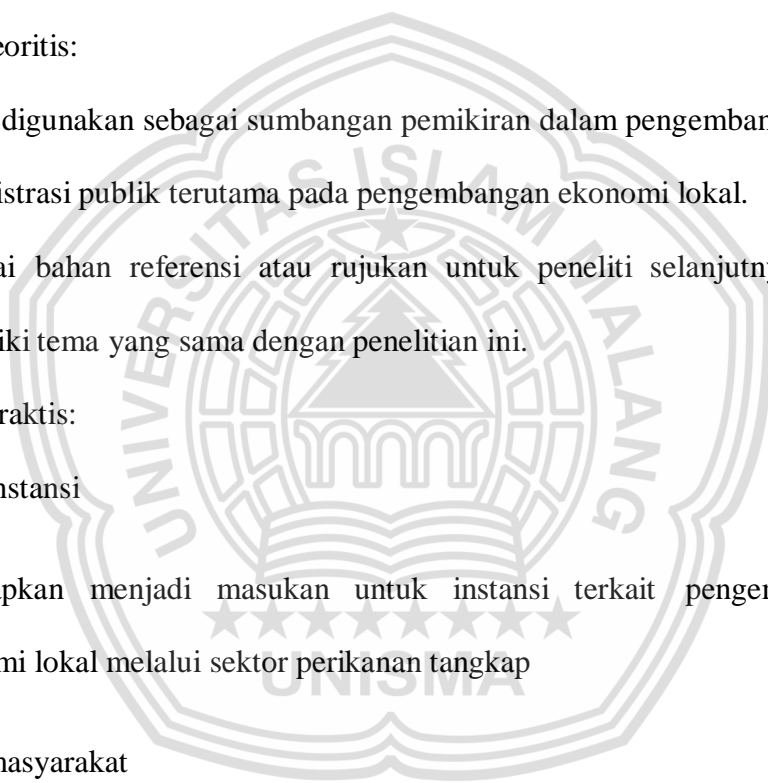
Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat mendapatkan manfaat sebagai berikut:

7. Manfaat teoritis:
  - a. Dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu administrasi publik terutama pada pengembangan ekonomi lokal.
  - b. Sebagai bahan referensi atau rujukan untuk peneliti selanjutnya yang memiliki tema yang sama dengan penelitian ini.
8. Manfaat praktis:
  - a. Bagi instansi  

Diharapkan menjadi masukan untuk instansi terkait pengembangan ekonomi lokal melalui sektor perikanan tangkap
  - b. Bagi masyarakat  

Diharapkan penelitian ini dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat
  - c. Bagi peneliti  

Sebagai sarana bagi peneliti untuk memperluas dan mengetahui terutama dalam peran pemerintah daerah dalam meningkatkan pengembangan ekonomi lokal melalui sektor perikanan tangkap.



## E. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah sesuatu yang ingin diteliti sehingga peneliti dapat merinci kembali bahasan yang akan diteliti, penetapan fokus penelitian dilakukan agar peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data yang akan diperoleh. Dalam hal ini peneliti akan memfokuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

- a. Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan pengembangan ekonomi lokal melalui sektor perikanan tangkap di kabupaten lamongan:
  - a. Peran pemerintah daerah dalam pengembangan sumberdaya manusia.
  - b. Peran pemerintah daerah sebagai kordinator.
  - c. Peran pemerintah daerah sebagai fasilitator seperti memberi bantuan pemodalan, bantuan sarana produksi dan
  - d. Peran pemerintah daerah sebagai stimulator atau pameran.
- b. Faktor yang mempengaruhi peran pemerintah daerah dalam meningkatkan pengembangan ekonomi lokal melalui sektor perikanan tangkap di kabupaten lamongan.
  - a. Faktor pendukung: tersedianya sumberdaya perikanan tangkap, peran dalam kelompok usaha bersama perikanan tangkap dan adanya peran stakeholders yang terlibat.
  - b. Faktor penghambat: kualitas sumberdaya manusia yang rendah dan keterbatasan aparatur pemerintah.

- e. Dampak dari pengembangan ekonomi lokal melalui sektor perikanan tangkap di kabupaten lamongan.
  - a. Memberikan dampak yang baik.
  - b. Meningkatnya pendapatan nelayan.
  - c. Meningkatnya pendapatan pelaku industri pengolah hasil perikanan.
  - d. Meningkatnya hubungan jaringan kemitraan





## BAB 5

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa, Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Sektor Perikanan Tangkap.

a. Peran Pemerintah Daerah sebagai Entrepreneur pengembangan sumberdaya manusia

Pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan melakukan pelatihan kepada nelayan di wilayah pesisir Kabupaten lamongan, selain melakukan pelatihan kepada nelayan, juga melakukan pelatihan kepada pengusaha pengolah hasil perikanan.

b. Peran Pemerintah Daerah sebagai Koordinator

Dinas Perikanan Kabupaten lamongan mengkoordinasi semua lembaga atau stakeholder, stakeholder yang terlibat meliputi Usaha Kecil Menengah, Dinas Koperasi, Badan Perencanaan Pembangunan, Kelompok Usaha Bersama Perikanan, Badan Usaha Milik Nasional atau Daerah, Badan Usaha Swasta. Selain mengkoordinasi lembaga atau Stakeholder juga melakukan pengembangan Kelompok Usaha Bersama Perikanan Tangkap Kabupaten Lamongan, kelompok tersebut berjumlah 97 kelompok.

#### c. Peran Pemerintah Daerah sebagai Fasilitator

Bantuan pemodalannya yang diberikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan yaitu perbankan, yang diberikan kepada nelayan dan juga pengusaha hasil perikanan. Selain itu Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan juga memberikan bantuan sarana produksi perikanan berupa alat tangkap perikanan kepada nelayan yaitu Jaring gillnet, mesin perahu, gps atau alat pendeteksi ikan dan juga bantuan yang diberikan kepada pengusaha pengelola ikan berupa peralatan pengolahan.

#### d. Peran Pemerintah Daerah sebagai Stimulator

Upaya yang dilakukan Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan dalam mempercepat pembangunan yaitu melalui pameran dengan mengikuti pameran dan juga dengan diadakannya pameran tersebut dapat membantu masyarakat sektor perikanan tangkap Kabupaten Lamongan dalam mengenalkan produk asli dari Kabupaten Lamongan kepada konsumen.

Faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan ekonomi lokal sektor perikanan tangkap yaitu, faktor pendukungnya yaitu tersedianya sumberdaya perikanan tangkap ini ditandai dengan bentuk pencapaian peningkatan produksi perikanan didukung oleh hasil perikanan tangkap pada tahun 2020 mencapai sebesar 79.819,32 Ton lebih tinggi dari pada tahun sebelumnya mengalami kenaikan 3,7 persen disbanding tahun 2019, peran dalam kelompok usaha bersama perikanan tangkap, KUB Perikanan Tangkap tersebut masih berjalan dengan baik, fungsi dari KUB yaitu untuk bersosialisasi dan saling memberi informasi tentang permasalahan terkait dengan perikanan tangkap, selain

itu adanya peran Stakeholders yang terlibat yaitu Bappeda, Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Nelayan dan Industri Pengolahan Hasil Perikanan.

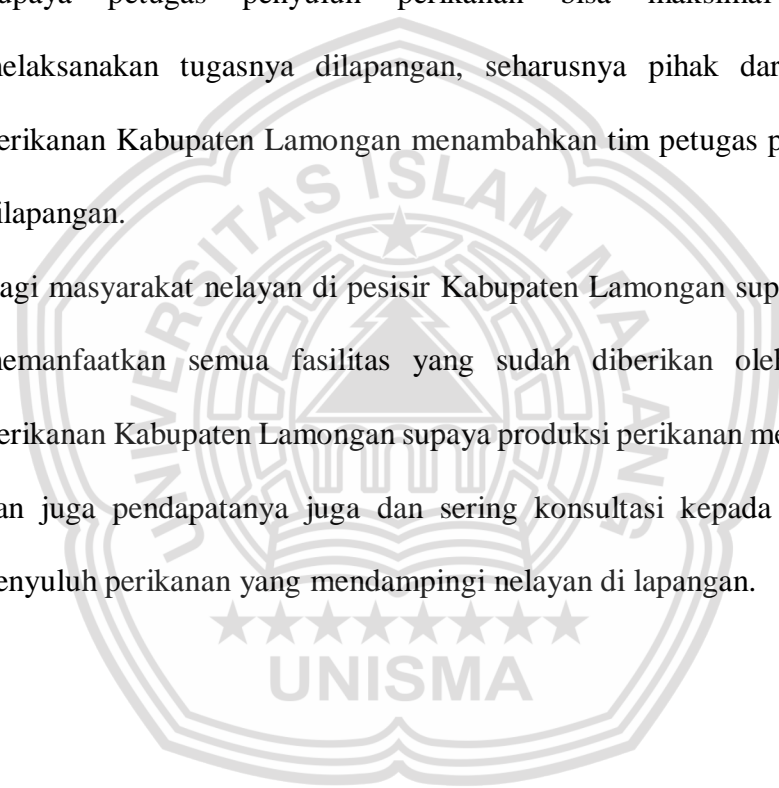
Faktor penghambatnya yaitu kualitas sumberdaya manusia yang rendah yaitu pola pikir nelayan dalam menggunakan penangkapan ikan masih tidak terbiasa dengan alat tangkap yang baru kebiasaan tersebut yang menjadi faktor budaya dari nenek moyang secara turun temurun dan keterbatasan aparatur pemerintah yaitu setiap satu orang petugas hanya bertugas di satu kecamatan sedangkan setiap kecamatan memiliki 5 desa bahkan lebih yang masyarakatnya bekerja disektor perikanan, serta keterbatasan anggaran yaitu anggaran yang diberikan oleh pemerintah kurang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dampak dari pengembangan ekonomi lokal melalui sektor perikanan tangkap yaitu meningkatnya pendapatan nelayan karena produksi perikanan tangkap yang meningkat setelah adanya bantuan alat produksi dan pelatihan dari Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan dan meningkatnya pendapatan pelaku industri pengolah hasil perikanan yang mampu menyerap tenaga kerja pada setiap pengusaha pengolah perikanan di wilayah pesisir Kabupaten lamongan serta meningkatnya hubungan kemitraan yaitu Dinas Perikanan Kabupaten lamongan dengan masyarakat nelayan pesisir Kabupaten Lamongan dan dalam pemberian pelatihan serta bantuan kepada masyarakat pesisir Kabupaten Lamongan.

## B. SARAN

Setelah melakukan penelitian mengenai peran pemerintah daerah dalam meningkatkan pengembangan ekonomi melalui sektor perikanan tangkap Kabupaten Lamongan, penulis berkenan menyampaikan beberapa saran yaitu

1. Supaya petugas penyuluh perikanan bisa maksimal dalam melaksanakan tugasnya dilapangan, seharusnya pihak dari Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan menambahkan tim petugas pelatihan dilapangan.
2. Bagi masyarakat nelayan di pesisir Kabupaten Lamongan supaya bisa memanfaatkan semua fasilitas yang sudah diberikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan supaya produksi perikanan meningkat dan juga pendapatanya juga dan sering konsultasi kepada petugas penyuluh perikanan yang mendampingi nelayan di lapangan.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Afifuddin. (2015). *Pengantar Administrasi Pembangunan, Konsep, Teori dan Implikasinya di Era Reformasi*. Bandung: Alfabeta.
- Arsyad, Lincolin. (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE
- Kamaludin, Laodem. (2002). *Pembangunan Ekonomi Maritim di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, Soerjono. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Alisjahbana. (2012). *Manajemen Kinerja Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Hayat. (2017). *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hayat. (2018). *Kebijakan Publik, Evaluasi, Revormasi, Formulasi*. Malang: Intrans Publishing.
- Hayat. (2018). *Reformasi Kebijakan Publik Perspektif Makro dan Mikro*. Edisi Pertama. Jakarta: Prenamedia Group.
- Hartono, (2010). *Manajemen Pemasaran*. Cetakan Pertama. Jakarta: Rinek Cipta.
- Kementrian Pekerjaan Umum. (2012). *Tentang Luas Wilayah Indonesia dan Samudra Pasifik*.
- Moelong, L. (2005). *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, (2001) *Metode Penelitian Kualitatif*, Magelang
- Sugiyono. (2015). *Memahami Penelitian Kualitatif. Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kulitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suryono, A. 2010, *Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: UB Press

### JURNAL

- Hayat (2014). *Konsep Kepemimpinan Dalam Reformasi Birokrasi: Aktualisasi Pemimpin Dalam Pelayanan Publik Menuju Good Governance*. Jurnal Borneo Administrator. Vol 10, No. 1.
- Hayat (2014). *Realokasi Kebijakan Fiskal: Implikasi Peningkatan Human Capital dan Pembangunan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Bina Praja. Vol 6, No. 2.
- Muhammad Ama Ridlwan, Slamet Muchsin dan Hayat, (2017). *Model Pengembangan Ekowisata dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Lokal*. Jurnal Politik Indonesia: Indonesia Political Science Review. Vol 2, No. 2.

- Hayat, Slamet Hidayat Turohman dan Yaqub Cikusin, (2018). *Strategi Pembangunan Sumber Daya Manusia Berbasis Pembangunan Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa*. Jurnal Transformasi Administrasi. Vol 8, No. 2.
- Hayat, (2020). *Paradigma Good Governance Menuju Shared Governance Melalui Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik*. Jurnal Astro (Social, Politic, Humaniora) Vol. 08, No.1.
- Sishadiyati. (2020). *Pengembangan Ekonomi Lokal di Kawasan Pesisir Kecamatan Bulak Surabaya*. Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen. Vol 3: No. 2.
- Siti Zumrotul Ainiyah, (2015). *Pengembangan Sumberdaya Ekonomi Lokal Berbasis Minapolitan Perikanan Tangkap di Desa Tasik Agung Kabupaten Rembang Jawa Tengah*.
- Supriyadi, Ery. (2007). *Telaah kendala penerapan pengembangan Ekonomi Lokal. Pragmatic Dalam Praktek PEL*. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- R. Didi Djadjuli. (2018). *Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Vol:5 No.2.
- Andri. K. (2018). *Strategi Pemberdayaan Melalui Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Pada Masyarakat Pesisir di Kabupaten Jember*. Program Studi Pendidikan Luar Sekolah, Jurusan Ilmu Pendidikan dan Keguruan Universitas Jember.

#### **DOKUMEN**

- Dinas Perikanan Provinsi Jawa Timur. 2020. *Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Jawa Timur*
- Dokumen Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan 2018 Dokumen LKJIP Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan 2020
- Dokumen Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan. 2017-2021
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 18 Tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap.
- Peraturan Presiden Indonesia Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan no. 35/KEPMEN-KP/2013 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan Kabupaten Lamongan.

#### **INTERNET**

- Badan Pusat Statistik. *Data Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Provinsi Jawa Timur*. 2020. [https://www.bps.go.id.view\\_data](https://www.bps.go.id.view_data)
- Dokumen/produksi/perikanan/<https://www.lamongankab.go.id>